

PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Faiza Adhlia Putri¹, Nasrullah Dali², Andi Muhammad Fuad Ramadhan Basru³
¹²³Universitas Halu Oleo

Email: faizaap1606@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampel dalam penelitian ini yaitu Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 52 Orang. Metode Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis dengan regresi linear sederhana dengan bantuan Aplikasi *Software IBM SPSS Statistic* Versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Jika Variabel Anggaran Berbasis Kinerja Meningkatkan Maka Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan meningkat. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode penelitian yang beragam seperti regresi berganda atau pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih kompherensif.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the Influence of Performance-Based Budget (X) on the Performance Accountability variable of Government Agencies (Y) in the Regional Financial and Asset Management Agency of Southeast Sulawesi Province. The sample in this study is 52 Civil Servants. Method Data collection using questionnaires. Analysis method with simple linear regression with the help of IBM SPSS Statistical Software Application Version 23. The results of this study show that the Influence of Performance-Based Budgeting has a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies. The conclusion of this study is that if the Performance-Based Budget Variable increases, then the Performance Accountability Variable of Government Agencies at the Regional Financial and Asset Management Agency of Southeast Sulawesi Province will also increase. For further research, it is recommended to use diverse research methods such as multiple regression or qualitative approaches to obtain a more comprehensive understanding.

Keywords: Performance-Based Budget, Performance Accountability of Government Agencies.

Article History

Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai reformasi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara agar mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif. Salah satu aspek penting dalam perubahan itu adalah transformasi cara penganggaran dari traditional budgeting ke performance based budgeting. Transformasi ini bertujuan untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran negara.

Undang-Undang No. 17 Tentang Keuangan Negara 2003 telah menetapkan bahwa APBD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatannya dan kegunaannya oleh masyarakat. Seiring dengan reformasi pemerintahan di Indonesia, dikeluarkan Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah, selain itu juga mengharuskan pemerintah untuk dapat memenuhi akuntabilitas tidak hanya kepada pemerintah pusat tetapi juga kepada masyarakat.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kendali penuh atas pengelolaan keuangan. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah, dibutuhkan suatu sistem yang mampu menyajikan data serta informasi untuk merancang anggaran dengan pendekatan berbasis kinerja, guna mengelola dana secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka desentralisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mardiasmo, 2018) yang mengatakan “wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik”.

Dalam implementasinya, anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang menghubungkan antara alokasi anggaran dengan hasil (output) dan manfaat (outcome) dari kegiatan yang direncanakan.

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu yang berperan penting dalam peningkatan performa pegawai, sebab ia menjadi fondasi utama untuk merealisasikan tata kelola yang baik good governance dalam pengelolaan organisasi publik.

Anggaran merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks instansi pemerintah, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Penggunaan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) semakin mendapat perhatian, karena dianggap mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas kinerja menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja. setiap instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan strategis dan pelaporan kinerja yang berorientasi hasil, untuk mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Menurut (Israr & Syofyan, 2022), tujuan utama dari anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran publik. Dengan mengaitkan alokasi dana bagi organisasi sektor publik kepada pencapaian hasil yang diharapkan, melalui informasi kinerja yang terstruktur dan sistematis. Implementasi anggaran berbasis kinerja dilaksanakan melalui tahapan siklus anggaran yang mengikuti prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran, serta evaluasi kinerja.

Dalam implementasinya, penerapan anggaran berbasis kinerja masih menghadapi sejumlah kendala di berbagai daerah. Hal ini juga terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meskipun menjadi tulang punggung

dalam pengelolaan keuangan daerah, namun masih menghadapi kendala dalam memastikan kesesuaian antara anggaran dengan capaian output dan outcome program kerja.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2020	55.538.179.280,00	52.467.726.547,00	94,47
2021	671.279.237.820,00	621.043.786.083,00	92,52
2022	855.161.319.128,00	724.677.305.992,00	84,74
2023	1.026.907.912.109,00	920.744.477.159,00	89,66
2024	963.134.416.234,00	804.063.278.255,00	83,48

Sumber: BPKAD Prov. Sultra 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai Laporan Akuntabilitas BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024, dapat dilihat bahwa antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai menunjukkan fluktuasi capaian kinerja. Dimana mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga mengindikasikan adanya kelemahan dalam efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terlihat adanya upaya konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi. Hal ini dapat dilihat dari target akuntabilitas yang ditetapkan sebesar 62,2% dengan predikat “B” (Baik).

Fenomena yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian realisasi anggaran dan tingkat akuntabilitas kinerja. Fluktuasi penyerapan anggaran serta capaian AKIP yang masih berada pada kategori 62,2% “Baik” menegaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya efektif dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Era digitalisasi pengelolaan keuangan daerah saat ini, pemerintah telah mendorong penggunaan sistem SIPD yang seharusnya memperkuat transparansi dan efisiensi anggaran. Beberapa faktor penyebab ketidaksesuaian antara lain penyusunan indikator kinerja yang belum terukur secara spesifik, kurangnya pemahaman teknis aparatur daerah, belum optimalnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Zulkan, 2019) yang menemukan bahwa meskipun anggaran berbasis kinerja telah diterapkan, pengaruhnya terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sambahas belum signifikan secara parsial. (Attamimi & Lestari, 2023) menunjukkan bahwa tidak semua tahapan dalam siklus anggaran berbasis kinerja seperti pelaporan dan evaluasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Sementara itu, (Sari dkk., 2021) menyatakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh

besar dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan.

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan peninjauan kembali mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara”.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) serta Scott (2000), Teori Keagenan (Agency Theory) dapat dianggap sebagai bentuk dari teori permainan yang melibatkan perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai agen dan pihak lainnya sebagai prinsipal.

Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan yang bersifat periodik, yang disusun berdasarkan program atau kegiatan yang telah disetujui secara resmi. Secara lebih rinci, anggaran atau *budget* adalah dokumen rencana tertulis yang menggambarkan aktivitas suatu organisasi dalam bentuk angka-angka kuantitatif, yang biasanya diukur menggunakan satuan mata uang, untuk rentang waktu yang telah ditentukan. Jadi, anggaran berperan sebagai instrumen manajemen yang esensial untuk membantu mencapai sasaran organisasi (Handayani, 2020).

Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut (Jan Hoesada, 2022) Anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu pilar reformasi keuangan yang paling mendasar di Republik Indonesia, dimana pendekatan ini dimulai dengan penetapan visi entitas, sasaran jangka panjang, menengah, dan pendek (tahunan), kinerja jangka pendek (tahunan) dan penentuan output pencapaian (tahunan) yang kemudian diuraikan menjadi kinerja tahunan kegiatan utama sesuai tugas pokok, fungsi, proyek serta program dari entitas terkait.

Menurut BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2009), penerapan anggaran berbasis kinerja meliputi :

1. Penyusunan Rencana Strategi
2. Sinkronisasi
3. Penyusunan Kerangka Acuan
4. Penetapan Indikator Kinerja
5. Pengukuran Kinerja
6. Pelaporan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut (Rusdiana & Nasihudin, 2021) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi untuk meraih tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, melalui mekanisme pertanggungjawaban yang fleksibel dan adaptif.

Menurut (Mardiasmo, 2021) Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal
2. Akuntabilitas Horizontal

Adapun dalam Akuntabilitas Kinerja Terdapat Empat aspek yang di ukur yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for probity dan legality*).

Akuntabilitas kejujuran (*Accountability for probity*) berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*Abuse Of Power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*Legal Accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan petanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

3. Akuntabilitas proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan sudah cukup baik atau belum dalam menjalankan tugas, meliputi kecukupan sistem akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya.

4. Akuntabilitas program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan sudah mempetimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Teori Keagenan Dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas segala kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2018).

Dalam hal ini, organisasi sektor publik, baik instansi maupun pemerintah daerah, sudah seharusnya mampu menjadi subjek dalam pemberian informasi untuk memenuhi hak-hak publik. Keterkaitan pelimpahan wewenang antara prinsipal dengan agen diketahui melalui pelacakan proses-proses anggaran.

H1 : Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan data terbagi jadi dua yaitu secara primer dimana diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan secara sekunder yaitu berasal dari laporan akuntabilitas, daftar pegawai, dll. Populasi dalam penelitian sebanyak 105 Orang Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penetapan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

**Tabel 3.1 Daftar Sampel Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Perencanaan Dan Keuangan	5 Orang
4	Bidang Anggaran	14 Orang
5	Bidang Perbendaharaan	10 Orang
6	Bidang Akuntansi	12 Orang
7	Bidang Aset	9 Orang
Jumlah		52 Orang

Sumber : BPKAD Prov. Sultra 2025

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan *IBM SPSS Statistic 23*. Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian, sehingga memudahkan pemahaman terhadap data yang dikumpulkan. Kemudian, dilakukan pengujian Instrumen penelitian mencakup Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Lalu dilakukan pengujian asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Sedangkan analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen secara parsial.

Definisi Operasional Variabel

Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran yang menghubungkan antara keluaran (*Output*) dengan hasil (*Outcome*) yang disertai dengan efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasi sehingga menilai apa yang dihasilkan dari program atau kegiatan tersebut. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Setyanusa & Mutmainnah, 2022) yaitu Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi Yang Hendak Dicapai, Program dan Kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Dengan menggunakan 3 indikator menurut (Setyanusa & Mutmainnah, 2022) yaitu Efisiensi, Efektivitas, Outcome.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN**Karakteristik Responden**

Tabel 4.1
Tingkat Pengambilan Keusioner

No	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
1	Kuesioner yang dibagi	52	100%
2	Kuesioner yang Kembali	51	98%
3	Kuesioner yang tidak Kembali	1	2%
4	Jumlah kuesioner yang dapat di analisis	51	98%

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang Kembali adalah 98% atau hanya sebanyak 51 dari 52 kuesioner yang disebar. Jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 2% atau 1 kuesioner yang dikarenakan mengikuti perjalanan dinas oleh 1 pegawai.

Hasil Uji Analisis Deskriptif

Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	38.86	3.244	51
Anggaran Berbasis Kinerja	65.55	5.427	51

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif di atas menunjukkan data yang didapat oleh peneliti adalah:

1. Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X), dari data diatas tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai rata-rata X sebesar 65,55 dan standar deviasi adalah sebesar 5.427
2. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), dari hasil data diatas bisa disimpulkan bahwa nilai rata-rata Y sebesar 38,86 dan standar deviasi adalah sebesar 3.244

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Hasil Uji Validitas dan Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Anggaran Berbasis Kinerja

Variabel	Indikator	Item	Koefisien Korelasi	Sig.	Ket.	Cronbach Alpha	Ket.
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X)	Sasaran (X.1)	X1.1.1	0,829	0,00	Valid	0,744	Reliabel
		X1.1.2	0,811	0,00	Valid		Reliabel
		X1.1.3	0,807	0,00	Valid		Reliabel
	Tujuan (X.2)	X1.2.1	0,789	0,00	Valid	0,643	Reliabel
		X1.2.2	0,824	0,00	Valid		Reliabel
		X1.2.3	0,672	0,00	Valid		Reliabel
	Visi Misi Yang Hendak Dicapai (X.3)	X1.3.1	0,789	0,00	Valid	0,722	Reliabel
		X1.3.2	0,854	0,00	Valid		Reliabel
		X1.3.3	0,767	0,00	Valid		Reliabel
	Program (X.4)	X1.4.1	0,746	0,00	Valid	0,651	Reliabel
		X1.4.2	0,838	0,00	Valid		Reliabel
		X1.4.3	0,716	0,00	Valid		Reliabel
	Kegiatan (X5)	X1.5.1	0,935	0,00	Valid	0,908	Reliabel
		X1.5.2	0,912	0,00	Valid		Reliabel
		X1.5.3	0,910	0,00	Valid		Reliabel

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Efisiensi (Y1)	Y1.1.1	0,814	0,00	Valid	0,664	Reliabel
		Y1.1.2	0,785	0,00	Valid		Reliabel
		Y1.1.3	0,724	0,00	Valid		Reliabel
	Efektivitas (Y.2)	Y1.2.1	0,788	0,00	Valid	0,713	Reliabel
		Y1.2.2	0,799	0,00	Valid		Reliabel
		Y1.2.3	0,807	0,00	Valid		Reliabel

	Outcome (Y3)	Y1.3.1	0,829	0,00	Valid	0,860	Reliabel
		Y1.3.2	0,921	0,00	Valid		Reliabel
		Y1.3.3	0,900	0,00	Valid		Reliabel

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 dan tabel 4.4 menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam kuesioner merupakan pernyataan yang valid dan reliabel. Keputusan ini diambil karena nilai dari koefisien korelasi diatas 0,2759 dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 dan memiliki nilai cronbach's alpha $\geq 0,60$, artinya bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel atau dapat diandalkan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah Uji Kolmogorov-Smirnov dimana jika nilai signifikan atau probabilitas $> 0,05$. Maka variabel residual dinyatakan berdistribusi normal (Ghozali, 2021).

Tabel 4.5 Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.66976076
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.049
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

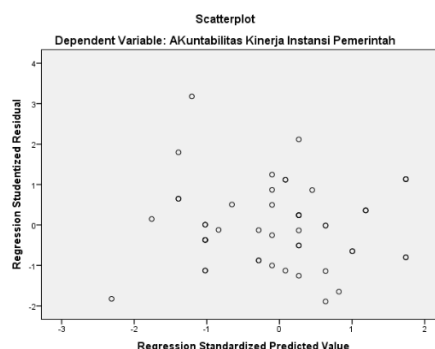
Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan tabel diatas pada signifikansinya terdapat nilai sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan normal tidak terjadi masalah normalitas.

Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2021) menjelaskan bahwa uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan gambar *scatter plot* diatas , terlihat secara visual bahwa titik-titik menyebar secara acak (tidak membentuk pola yang jelas) dan tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat hubungan atau korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode ke-t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Apabila ditemukan adanya korelasi tersebut, maka model regresi dinyatakan mengalami masalah autokorelasi.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, dapat digunakan nilai *Durbin-Watson* (D-W) yang tercantum dalam tabel *Durbin-Watson* sebagai dasar pengambilan keputusan. Syarat tidak terjadi autokorelasi jika $DU < DW < 4 - DU$.

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi Model Summary

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.568 ^a	.323	.309	2.697	2.007

a. Predictors: (Constant), Anggaran berbasis Kinerja

b. Dependent Variable: AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat pada angka Durbin-watson (D-W) adalah 2,007. Maka dapat dihitung berdasarkan rumus tidak terjadi autokorelasi yaitu :

- Rumus = $DU < DW < 4 \cdot DU$
- Diketahui $N = 51$
- Nilai $DL = 1,5086$
- Nilai $DU = 1,5884$
- Nilai $4 \cdot DU = 2,4116$

Kesimpulannya $1,5884 < 2,007 < 2,4116$ ($DU < DW < 4 \cdot DU$) berarti tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Analisis Data

Analisis Regresi Linear Sederhana

Metode statistik untuk memodelkan hubungan linier antara satu variabel independen dan satu variabel dependen, digunakan untuk analisis dan prediksi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun hasil dari uji hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil Estimasi Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.614	4.622		3.595	.001
	Anggaran Berbasis Kinerja	.339	.070	.568	3.793	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka dibuatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 16,614 + 0,339 + \varepsilon$$

1. Nilai konstanta bernilai positif, yaitu sebesar 16,614. Hal ini bahwa jika Variabel Anggaran berbasis kinerja (X) dianggap bernilai 0 atau tidak diterapkan, maka nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Y) tetap 16,614 (konstan).
2. Nilai B sebesar 0,339 yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada variabel Anggaran Berbasis Kinerja sebanyak satu satuan, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan meningkat sebesar 0,339.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel dengan nilai signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.614	4.622		3.595	.001
	Anggaran Berbasis Kinerja	.339	.070	.568	3.793	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Hipotesis penelitian (H1) menyebutkan bahwa “Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Setelah dilakukan pengujian menggunakan *IBM SPSS Statistic 23*, diperoleh nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$ dan t-hitung $3,793 > t\text{-tabel } 1,675$ maka H1 diterima atau H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai R^2 mempunyai interval 0 sampai 1.

Tabel 4.9 Hasil Uji R^2

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change				
							df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson

1	.568 _a	.323	.309	2.697	.323	23.32 ₇	1	49	.000	2.007
---	-------------------	------	------	-------	------	--------------------	---	----	------	-------

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,323 dan *Adjusted R Square* sebesar 0,309. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja mampu menjelaskan 32,3% variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan 67,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai koefisien determinasi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan Anggaran Berbasis Kinerja memiliki kontribusi terhadap peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum menjadi faktor dominan. Kondisi ini dapat dipahami mengingat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan konsep yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem pengendalian internal, good governance, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengaruh dalam penelitian ini adalah pengaruh positif yang berarti bahwa semakin meningkat Anggaran berbasis kinerja yang dilakukan pada instansi, maka akan semakin meningkat juga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah para pemimpin dan pegawai. Sebaliknya, jika variabel anggaran berbasis kinerja mengalami penurunan maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan mengalami penurunan.

Pada tabel regresi linear sederhana diatas dimana koefisien regresi untuk variabel anggaran berbasis kinerja memiliki nilai konstanta bernilai positif, dapat diartikan bahwa apabila variabel anggaran berbasis kinerja terjadi kenaikan, maka variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan pengujian Koefisien Determinasi pengaruh yang diberikan oleh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 32,3%, sedangkan sisanya sebesar 67,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem pengendalian internal, good governance, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja.

Penelitian ini berkaitan dengan teori keagenan (Agency Theory) yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa hubungan antara principal dan agen. Dalam sektor pemerintahan, masyarakat selaku principal memberikan amanah kepada pemerintah selaku agen. Pemerintah selaku agen yang menjadi pemegang amanah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sehingga, Anggaran Berbasis Kinerja berperan sebagai mekanisme pengendalian agar agen bekerja sesuai kepentingan prinsipal.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada orang yang memberi amanah (principal) tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Marselia & Ardhiarisca, 2023) Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada RSUD Sidoarjo dengan hasil Berpengaruh Positif dan Signifikan dengan menggunakan teori Agensi, (Afronisa & Erawati, 2024) yang berjudul The Effect Of Performance-Based Budgeting, Accounting Control And Reporting Systems On Government Performance Accountability dengan hasil Berpengaruh Positif Dan Signifikan, (Sari dkk., 2021) menyatakan bahwa Anggaran berbasis kinerja berpengaruh besar terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini bermakna semakin baik penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, maka akan semakin baik juga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran dengan harapan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak yang terkait.

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, khususnya pada aspek perumusan indikator kinerja, keselarasan antara program, kegiatan, dan sasaran strategis, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan anggaran lebih efektif dan akuntabel.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, seperti regresi berganda atau pendekatan kualitatif, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Afronisa, P. N., & Erawati, N. M. A. (2024). *The Effect Of Performance-Based Budgeting , Accounting Control And Reporting Systems On Government Performance Accountability*. 13(04), 1508-1523. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i04>
- Attamimi, & Lestari. (2023). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Akuntansi*, 19(01), 118-130.
- Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. *Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. *Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja*. (2008). Jakarta.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). *Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja*. (2009). Jakarta.
- Creswell, John W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Edisi ke-5)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi ke-11)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Pemerintah hingggah Tempat Ibadah (Salemba Em)*. Jakarta.
- Handayani, T. (2020). *Pengertian Anggaran*.
- Hoesada, J. (2022). *Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis*. Andi.
- Ismail, & Idris. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta : Indeks.
- Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 686-697. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.550>
- Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Lembaga Administrasi Negara & Badan Pembangunan dan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntabilitas dan Good Governance. (2000). Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII : Press Yogyakarta.
- Mardiasmo, M. B. A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Marselia, I. T., & Ardhiarisca, O. (2023). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada RSUD Sidoarjo). *Jurnal*

Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 18(2), 145-155.
<https://doi.org/10.52062/jaked.v18i2.3049>

Mauliya, I., Haykal, M., Raza, H., & Yunita, N. A. (2024). Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pelaporan/Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 3(4), 551-570.
<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jam/article/view/17439%0Ahttps://ojs.unimal.ac.id/index.php/jam/article/download/17439/8135>

Nordiawan, Dedi, & dkk. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2014). Jakarta : Presiden Republik Indonesia.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2007).

Ritonga, P. (2021). *Keuangan Negara*. Penerbit Umsu Press.

Rusdiana, & Nasihudin. (2021). *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*.

Safaruddin, & Basri, S. (2016). PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara*.

Santoso, A. (2021). *Aplikasi Statistik dengan SPSS 26: Analisis Regresi dan Korelasi (Edisi ke-3)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sari, M. S., Suhendar, & Nofitri, R. (2021). PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH” (studi pada Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan). *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.57084/jata.v2i1.585>

Savitri, E. (2018). *Penganggaran Perusahaan*Yogyakarta: Pustaka Sahila.

Setyanusa, I. B., & Mutmainnah, U. G. (2022). *Pengaruh Perencanaan Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei Pada Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bandung)*. 2(2), 172-191.
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jemba/index>

Solimun, Fernandes, & Nurjannah. (2017). *Metode Statistika Multivariat: Peemodelan Persamaan Struktural Pendekatan WarpPLS*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Ke-2)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik* Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Undang-Undang No. 17 Tentang Keuangan Negara. (2003).

Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Zulkan. (2019). : Anggaran Berbasis Kinerja, Pertanggungjawaban Belanja, Audit Intern, dan LAKIP. *Jurnal SEBI (Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(li).